

Berita	: Tiga Tahun Gagal Raih WTP
Entitas / Cakupan	: Kota Bandung
Sumber / Hal	: Radar Bandung / Hal.1
Edisi	: Kamis, 31 Mei 2018

Tiga Tahun

Gagal Raih WTP

BANDUNG - Kesekian kalinya Pemerintah Kota Bandung kembali gagal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kepala BPK Perwakilan Jawa

Barat, Arman Syifa mengatakan, jika dilihat dari perkembangan pelaporannya, Pemkot Bandung sudah banyak kemajuan. Namun, ada beberapa poin yang membuatnya tidak cukup meraih WTP.

Adapun hal yang membuat Pemkot Bandung gagal meraih WTP tahun ini, kata Arman, masih ada beberapa masalah terkait pencatatan piutang sewa tanah.

"Ada beberapa kontrak penyewaan tanah yang kita tidak dapat yakini kewajarannya karena sampai hari ini tidak ada pembaruan kontrak," katanya saat ditemui di Kantor BPK Perwakilan Jabar, Jalan Moh. Toha, Kota Bandung, Rabu (30/5).

"Dasar pencantuman piutang gak ada, berapa nilainya, berapa lama dan sebagainya gak ada," ungkapinya.

Selanjutnya, terkait asset

tetap yang tersisa Rp 694 miliar disajikan tidak berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar. Aset tanah peralatan, mesin, gedung, bangunan dan jalanan irigasi jaringan senilai Rp 430 miliar tidak diketahui keberadaannya.

"Perlu saya tegaskan, (aset) ini belum tentu gak ada. Cuma ketika sampai akhir pemeriksaan kita tidak menerima (laporan rinci)," jelasnya.

Menurutnya, dalam kasus seperti ini BPK ada kewenangan mengoreksi laporan. Hanya

saja, pemerintah daerah harus memberikan data berapa nilai aset atau nilai piutang. Namun, upaya itu pun tidak bisa ditempuh karena dinas terkait tidak bisa menunjukan data yang dibutuhkan.

Lebih lanjut, poin terakhir adalah terkait utang jangka pendek lainnya. Arman mengatakan ada sebagian dari saldo jangka pendek yang tidak dilengkapi rincian.

"(Laporan tanpa rincian) Ini belum tentu salah. tapi setiap laporan itu harus ada rincian-

nya," tuturnya.

Sehingga kata dia, BPK tidak bisa memverifikasi, apakah wajar tidak hutang itu. Namun, ketika BPK mendatangi beberapa satker (satuan kerja) bersangkutan (di Pemkot Bandung), BPK sama sekali tidak bisa mendapatkan bukti.

Dengan catatan ini, Arman menyatakan bahwa setidaknya selama tiga tahun terakhir, Pemerintah Kota Bandung tidak pernah meraih WTP. **(azs)**